

ABSTRAK

Alda Nur Arizma RifalRiani, 126101202081, Analisis Yuridis Klausul Baku Penyelesaian Sengketa Pada Asuransi Prudential Syariah (Studi Kasus Pada Prudential Syariah Kediri), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Klausul Penyelesaian Sengketa, Asuransi Syaiah.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa terjadinya sengketa asuransi syariah adanya masalah-masalah, seperti tidak terpenuhinya kewajiban, tidak dibayarnya klaim, dan wanprestasi dalam polis asuransi jiwa dan kendaraan bermotor syariah. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan pengadilan. Pada setiap penyedia layanan asuransi syariah memiliki klausul penyelesaian sengketa yang berbeda-beda setiap polis asuransi syariah. Di dalam klausul penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, badan arbitrase syariah (BASYARNAS), pengadilan agama dan BMAI.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Klausul Penyelesaian Sengketa Pada Asuransi Prudential Syariah Kediri? 2) Bagaimana Analisis Yuridis Klausul Penyelesaian Sengketa Pada Asuransi Prudential Syariah Kediri?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri. Untuk mengetahui analisis yuridis klausul penyelesaian sengketa pada Asuransi Prudential Syariah Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian studi empiris serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi mendalam. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Asuransi syariah hadir dalam masyarakat muslim modern untuk memberikan pilihan asuransi alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Perusahaan asuransi syariah seperti Prudential Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan kontribusi sebesar 38% pada tahun 2023. Faktor yang memengaruhi jumlah polis di Kediri antara lain pertumbuhan peserta, penerimaan masyarakat terhadap asuransi syariah, dan diversifikasi produk. Pada asuransi syariah Prudential Syariah Kediri menggunakan jenis perjanjian baku yang memberikan efisiensi waktu dan layanan yang sama kepada konsumen tetapi membatasi kesempatan mereka untuk bernegosiasi dan menentukan isi perjanjian. Sengketa asuransi syariah dapat terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah, sengketa tersebut harus diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kepentingan individu dan menjaga keharmonisan serta keadilan sosial. 2) Penyelesaian sengketa dalam

konteks hukum mengacu pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan antara para pihak. Terdapat beberapa jenis penyelesaian sengketa dalam konteks asuransi syariah secara khusus: Musyawarah untuk mufakat; Mediasi; Arbitrase Syariah; Ajudikasi melalui Pengadilan Agama; Pendampingan Dewan Pengawas Syariah; dan Konsiliasi. Sebelum masuk ke tahap penyelesaian sengketa lebih lanjut, sengketa terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah oleh internal perusahaan. Klausul penyelesaian sengketa yang merujuk kepada BASYARNAS setelah musyawarah mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHES dan peraturan terkait di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional, serta memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, penting bagi perusahaan asuransi dan peserta untuk memahami dan menyepakati klausul tersebut secara jelas, agar tidak ada sengketa tambahan terkait mekanisme penyelesaian. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016, pada perusahaan asuransi syariah diwajibkan memberikan informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase apabila musyawarah tidak berhasil. Tetapi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa asuransi syariah namun KHES dapat digunakan sebagai hukum materiil untuk mengantisipasi sengketa syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Jadi, dapat disimpulkan dalam Prudential Syariah Kediri sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan POJK. Namun, dalam polis tidak mencantumkan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Alda Nur Arizma RifalRiani, 126101202081, Juridical Analysis of Dispute Settlement Clauses in Prudential Syariah Insurance (Case Study at Prudential Syariah Kediri), Sharia Economic Law Study Program, Sharia Department, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University, Supervisor: Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Keywords: Juridical Analysis, Dispute Settlement Clause, Sharia Insurance.

This research is motivated by the fact that sharia insurance disputes have problems, such as non-fulfillment of obligations, non-payment of claims, and defaults in sharia life and motor vehicle insurance policies. To resolve the dispute, it can be done in various ways, such as arbitration, mediation, negotiation, and court. Each Islamic insurance service provider has a dispute resolution clause that is different for each Islamic insurance policy. The dispute settlement clause can be resolved through deliberation, sharia arbitration body (BASYARNAS), religious court and BMAI.

The problem formulations in this research are: 1) How is the Dispute Resolution Clause in Kediri Prudential Syariah Insurance? 2) How is the Juridical Analysis of the Dispute Settlement Clause in Kediri Sharia Prudential Insurance?. The objectives of this research are: 1) To find out how the dispute resolution clause in Kediri Sharia Prudential Insurance. To find out the juridical analysis of the dispute resolution clause in Kediri Sharia Prudential Insurance.

The type of research used by researchers is empirical study research and uses a qualitative research approach. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and in-depth observations. While the data analysis techniques used are data collection, data presentation, and conclusion drawing. Then checking the validity of the data using triangulation.

The results of this study indicate that: 1) Islamic insurance is present in modern Muslim society to provide alternative insurance options that are in accordance with Islamic teachings. Islamic insurance companies such as Prudential Syariah are experiencing significant growth, with an increase in contribution of 38% by 2023. Factors that influence the number of policies in Kediri include participant growth, public acceptance of Islamic insurance, and product diversification. In sharia insurance Prudential Syariah Kediri uses a type of standard agreement that provides time efficiency and the same service to consumers but limits their opportunity to negotiate and determine the contents of the agreement. Islamic insurance disputes can occur between policyholders and Islamic insurance companies, these disputes must be resolved by referring to sharia principles that prioritize individual interests and maintain harmony and social justice. 2) Dispute resolution in a legal context refers to the process of resolving conflicts or disputes between parties. There are several types of dispute resolution in the context of Islamic insurance specifically: Deliberation for consensus; Mediation; Sharia Arbitration; Adjudication through the Religious Court; Sharia Supervisory Board

Assistance; and Conciliation. Before entering the further dispute resolution stage, the dispute is first sought to be resolved through deliberation by the internal company. The dispute resolution clause that refers to BASYARNAS after deliberation reflects the principles stipulated in KHES and related regulations in Indonesia. Dispute settlement through BASYARNAS is in accordance with sharia principles and national law, and provides legal certainty and efficiency for the parties. In its implementation, it is important for insurance companies and participants to understand and agree on the clause clearly, so that there are no additional disputes related to the settlement mechanism. According to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 69/POJK.05/2016, sharia insurance companies are required to provide information regarding dispute resolution mechanisms through mediation or arbitration if deliberation is unsuccessful. But in the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) does not specifically regulate the settlement of sharia insurance disputes but KHES can be used as material law to anticipate sharia disputes submitted to the Religious Court. So, it can be concluded that Prudential Syariah Kediri is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa and POJK. However, the policy does not include a provision that dispute resolution can be resolved in the Religious Court.

الخلاصة

ألده نور أريزما ريفال ريانى، ١٢٦١٠١٢٠٢٠٨١، التحليل الفقهي لبنود تسوية دراسة حالة في شركة الشريعة) المنازعات في التأمين الشرعي الاحترازي ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، (الاحترازية الاحترازية كيديري قسم الشريعة، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله تولونغاوغونغ الإسلامية الحكومية، المشرف: الدكتوراه ريني دوي بوسبتاساري، ماجستير في الشريعة.

الكلمات المفتاحية: التحليل الفقهي، شرط تسوية المنازعات، التأمين الشرعي. الدافع وراء هذا البحث هو أن منازعات التأمين الشرعي تنشأ عنها مشاكل، مثل عدم الوفاء بالالتزامات، وعدم سداد المطالبات، والتخلف عن السداد في وثائق التأمين الشرعي على الحياة والمركبات. ويمكن حل النزاع بطرق مختلفة مثل التحكيم، والوساطة، والتفاوض، والمحكمة، لحل النزاع. لدى كل مزود خدمة تأمين إسلامي شرط تسوية المنازعات الذي يختلف لكل وثيقة تأمين إسلامي. ويمكن حل شرط تسوية المنازعات من خلال المداولة، وهيئة التحكيم الشرعية والمحكمة الشرعية، وهيئة التحكيم الشرعية.

وصيغ المشكلة في هذا البحث هي (١) كيف يتم تطبيق بند تسوية المنازعات في شركة كيديري للتأمين الشرعي الاحترازي؟ (٢) كيف يتم التحليل القانوني لشرط تسوية المنازعات في شركة كيديري للتأمين الشرعي التحوطي؟ أهداف هذا البحث هي معرفة كيفية التحليل الفقهي لشرط تسوية المنازعات في شركة كيديري للتأمين التحوطي الشرعي. معرفة التحليل الفقهي لشرط تسوية المنازعات في شركة كيديري للتأمين التحوطي الشرعي.

نوع البحث الذي يستخدمه الباحثون هو البحث الميداني ويستخدم منهج البحث المعياري. وتقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلات المتعمقة والملاحظات المتعمقة. بينما تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي جمع البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. ثم التحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي (١) التأمين الإسلامي موجود في المجتمع الإسلامي الحديث لتوفير خيارات تأمينية بديلة تتوافق مع التعاليم الإسلامية. تشهد

شركات التأمين الإسلامي مثل شركة برودنشال الشريعة الإسلامية نموًا كبيرًا، مع زيادة في المساهمة بنسبة ٣٨٪ بحلول عام ٢٠٢٣. تشمل العوامل التي تؤثر على عدد البوالص في كيديري نمو عدد المشاركين، والقبول العام للتأمين الإسلامي، دراسة حالة في شركة وتنوع المنتجات. في التأمين الشرعي، تستخدم شركة في التأمين الإسلامي نوعًا من الاتفاقيات الشريعة الاحترافية الاحترافية كيديري القياسية التي توفر الكفاءة الزمنية والخدمة نفسها للمستهلكين ولكنها تحد من فرصهم في التفاوض وتحديد محتويات الاتفاقية. وقد تحدث نزاعات في التأمين الإسلامي بين حاملي وثائق التأمين الإسلامي وشركات التأمين الإسلامي، ويجب حل هذه النزاعات بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعطي الأولوية للمصالح الفردية وتحافظ على الانسجام والعدالة الاجتماعية. يشير حل المنازعات في السياق القانوني إلى عملية حل النزاعات أو الخلافات بين الأطراف. وهناك عدة أنواع من تسوية المنازعات في سياق التأمين الإسلامي على وجه التحديد: المداولة للتوافق؛ والوساطة؛ والتحكيم الشرعي؛ والتحكيم من خلال المحكمة الشرعية؛ ومساعدة هيئة الرقابة الشرعية؛ والتوفيق. وقبل الدخول في مرحلة أخرى من مراحل تسوية المنازعات، تتم محاولة حل النزاع أولاً من خلال المداولة رقم ، توصي هذه الفتوى بحل من قبل الشركة الداخلية. وفي أحكام الفتوى المنازعات عن طريق المداولة أولاً، ثم اللجوء إلى التحكيم الشرعي ، فإن حل المنازعات يجب كحل أخير. أما في أحكام فتوى (BASYARNAS) أن يتم أولاً عن طريق المداولة والتوافق. إذا لم تسفر المداولات عن اتفاق، يمكن التوصل إلى تسوية من خلال الوساطة أو التحكيم أو من خلال الهيئة الوطنية رقم ، إذا لم تنجح المداولات، فيمكن إجراء التحكيم الشرعي. في أحكام الفتوى التسوية من خلال مؤسسة تحكيم شرعي أو من خلال محكمة لها سلطة تتعلق رقم (POJK) بالاقتصاد الشرعي. ووفقاً للائحة هيئة الخدمات المالية ، يتعين على شركات التأمين الشرعي تقديم معلومات ٦٩/POJK.05/2016 بشأن آليات تسوية المنازعات من خلال الوساطة أو التحكيم إذا لم تنجح المداولات. لا تنظم على (KHES) ولكن في أحكام مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية وجه التحديد تسوية منازعات التأمين الشرعي ولكن يمكن استخدام قانون التأمين الشرعي كقانون مادي لتوقع المنازعات الشرعية المقدمة إلى المحكمة الدينية. لذا، الشريعة الاحترافية الاحترافية كيديري تتوافق مع أحكام يمكن استنتاج أن شركة

ومع ذلك، لا تتضمن السياسة حكمًا ينص على إمكانية حل المنازعات في فتوى المحكمة الدينية.